



P E N E T A P A N

Nomor 678/Pdt.P/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsul. B bin Badawi, NIK : 760414207740005, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 678/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 19 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-598/Kua.31.03.13/PW.01/11/2019. bertanggal 19 November 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Hasmiati binti

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Syamsul. B dengan Abdul Hamid R. bin Rauf, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul. B, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Abdul Hamid. R bin Rauf, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan Lemogamba, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap akan dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 5 (lima) bulan dan anak Pemohon sudah sering keluar bersama calon suami anak Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan menurut pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Pemohon;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul. B untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid. R bin Rauf;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah melakukan perubahan surat permohonan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, namun yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Hasmiati binti Syamsul B. dan calon suaminya bernama Abdul Hamid R bin Rauf, keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7604141207740005, bertanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 7604142111110016, tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-598/KUA.31.03.13/PW.01/11/2019, bertanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakalii, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9845/UM/CS/X/2003, bertanggal 18 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Mariati binti Badawi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Makkombong Timur, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Syamsul B. bin Badawi;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Matakalii, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakalii, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) sudah tidak sekolah setelah tamat SMA;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abdul Hamid R bin Rauf;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan anak Pemohon telah mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan Lemogamba, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali,

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya;

- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. Ruslan bin Hambali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Syamsul B. bin Badawi;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) sudah tidak sekolah setelah tamat SMA;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abdul Hamid R bin Rauf;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan anak Pemohon telah mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

- bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai pendamping keluarga harapan (PKH) di Lingkungan Lemogamba, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya;
- bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul B. dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Hasmiati binti Syamsul B. baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid R. bin Rauf karena keduanya telah saling kenal selama 5 (lima) bulan, bahkan Hasmiati binti Syamsul B. mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon Hasmiati binti Syamsul B. telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh serta telah melamar Hasmiati binti Syamsul B.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari Hasmiati binti Syamsul B. yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Hasmiati binti Syamsul B. telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya tidak dipaksa untuk kawin karena antara Hasmiati binti Syamsul B. dengan Abdul Hamid R. bin Rauf telah saling kenal selama 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



serta telah siap untuk kawin bahkan Hasmiati binti Syamsul B. Mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Abdul Hamid R. bin Rauf telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan telah melamar Hasmiati binti Syamsul B.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotikopi kartu keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon dengan Hasmiati binti Syamsul B. sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa Hasmiati binti Syamsul B. termasuk anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali untuk mengawinkan anak Pemohon Hasmiati binti Syamsul B. karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memerlukan bukti lain untuk mencapai batas minimal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.g), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.g) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Matakalii, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) sudah tidak sekolah setelah tamat SMA dan calon suami anak Pemohon bernama Ardin bin Mudin telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 5 (lima) bulan bahkan anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya serta pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai pendamping keluarga harapan (PKH) di Lingkungan Lemogamba,

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya, lagi pula anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) sudah tidak sekolah setelah tamat SMA dan calon suami anak Pemohon bernama Ardin bin Mudin telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga Pemohon. Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar rumah bersama-sama dan anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya serta pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



pendamping keluarga harapan (PKH) di Lingkungan Lemogamba, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya, lagi pula anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hasmiati binti Syamsul B. adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Hasmiati binti Syamsul B., namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Mamasa, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) baru 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) telah berhenti sekolah setelah tamat SMA;
5. Bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) dengan Abdul Hamid R. bin Rauf telah menjalin hubungan cinta selama 5 (lima) bulan dan sering keluar bersama calon suaminya tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh Abdul Hamid R. bin Rauf;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



7. Bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) mengaku sudah berhubungan badan dengan calon suaminya;
8. Bahwa Hasmiati binti Syamsul B. dengan Abdul Hamid R. bin Rauf tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i, kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Hasmiati binti Syamsul B. mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Hasmiati binti Syamsul B.;

2. Bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) telah aqil baligh serta telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Hasmiati binti Syamsul B. adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Abdul Hamid R. bin Rauf, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul B. baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul B. belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah setelah tamat SMA, selain itu Hasmiati binti Syamsul B. telah menjalin hubungan cinta dengan Abdul Hamid R. bin Rauf yang telah berlangsung 5 (lima) bulan dan sering ke luar bersama calon suaminya bahkan Hasmiati binti Syamsul B. mengaku telah sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Hasmiati binti Syamsul B. telah dilamar

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



oleh Abdul Hamid R. bin Rauf dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Hasmiati binti Syamsul B. menampakkan kedewasaan serta telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Hasmiati binti Syamsul B. dengan Abdul Hamid R. bin Rauf sudah menjalin hubungan cinta, apalagi anak Pemohon (Hasmiati binti Syamsul B.) mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena Hasmiati binti Syamsul B. telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Hasmiati binti Syamsul B.) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal Hasmiati binti Syamsul B. Dengan calon suaminya telah saling mencintai sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصالح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul B. untuk menikah dengan laki-laki bernama Abdul Hamid R. bin Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasmiati binti Syamsul B. untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid R. bin Rauf;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I** dan **Ahmad Sarkowi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Sarkowi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp130.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp226.000,00.

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.678/Pdt.P/2019/PA.Pwl